

STRATEGI KPU DALAM MENINGKATKAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DI KABUPATEN BOYOLALI

Oleh: Shinta Dian Wahyuni, dan Aris Tri Haryanto

ABSTRACT

Wahyuni; Tri Haryanto, 2019. "The KPU Strategy to Increase The Level Of Disability Participation In Boyolali District" Public Administration, Slamet Riyadi University Surakarta. Theses unpublished.

The purpose of this study is to determine the strategy of Boyolali District Election Commission in increasing the level of disability participation in Boyolali District. The type of research used in this study is qualitative descriptive. Boyolali District election Commission conducted research. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques using the Intractive model Miles and Huberman. The validity of data in research is used triangulation techniques. Based on the results of the SWOT analysis, it can be concluded that the strategy of increased participation of the by the General Boyolali Commissioner Among others: 1) institutional strengthening, which is established: increasing the role of electoral Committee of the subdistrict (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), and the group voting organizers (KPPS) as a communicator in the socialization of election activities, The establishment of democracy Volunteers, 2) socialization strategies, which are founded: Face to Face Communication, Media communication, and the election of the Daughters of Democratic disability.

Key words: Participation, disability, socialization, communication

1. Pendahuluan

PemilihanKepala Daerah (Pilkada), PemilihanPresiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonsia akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Pemilihan Umum atau disebut juga Pemilu merupakan perwujudan

nyata dari proses demokrasi dan juga menjadi alat/media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilihan Umum supaya dapat menentukan siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan dan/atau mengawasi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga menjadi tantangan utama ialah mendorong dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada tahun 2018 dan tahun 2019 nanti. Fakta yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu, masih banyak masyarakat yang mengabaikan bahkan ada yang terang-terang tidak mau menggunakan hak pilihnya atau yang biasa disebut dengan golongan putih (golput)

Partisipasi Pemilu Presiden 2014 hingga Pilkada 2015 menunjukkan tren partisipasi masyarakat mengalami penurunan. Dimana berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi masyarakat tercatat 75,11% dari total daftar pemilih pada Pemilu Legislatif 2014. Sementara, pada Pemilu Presiden 2014, jumlah partisipasi semakin turun menjadi 71,31% dan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2015 hanya sebesar 69,14% (www.nasional.kompas.com, diakses tanggal 28 Januari 2018).

Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemilihan (Kepala Daerah/DPR/DPRD/DPD/Presiden) di Indonesia. KPU merupakan salah satu lembaga besar di negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 22 huruf E Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang memiliki wilayah kerja di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Yusuf (2010: 13) menyatakan bahwa KPU merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu harus selalu berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik dan juga tata tertib Peraturan KPU. Tugas serta wewenang KPU dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga dengan masyarakat yang mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam ajang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota ialah Penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota. Salah satu

nya adalah ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Dalam rangka mencapai target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU Pusat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres tersebut maka KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan sosialisasi kepada pemilih. Melalui pendidikan pemilih bagi Pemilih yang merupakan proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan. Pasal 1 No 34 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyatakan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Tugas KPU Kabupaten Boyolali pada dasarnya sama dengan KPU Pusat yaitu melaksanakan Pemilu dengan baik dan sukses sesuai target partisipasi politik yang telah ditetapkan. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pimpinan negara yang secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiardjo, 2009:367). Dengan demikian partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan kesadaran politik karena semakin orang tersebut sadar bahwa dirinya diperintah, orang tersebut kemudian menuntut untuk diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.

Tingkat partisipasi masyarakat dapat tercapai jika calon pemilih pemilu mengetahui hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu maka untuk mewujudkan hal tersebut KPU Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggara Pemilu bersinergi melakukan upaya dalam memberikan pemahaman pendidikan pemilih kepada pemilih agar menjadi pemilih yang cerdas. Dengan potensi jumlah pemilih sangat besar, maka perhatian serius terhadap pemilih penting untuk dilakukan. Ditengah mudah dan derasnya informasi diperoleh maka memberikan pemahaman yang baik tentang pemilu dan demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Pemahaman ini akan menjadi alas keyakinan kepada pemilih untuk bersikap atas praktik pemilu dan demokrasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres, oleh karena itu KPU berkewajiban untuk memberikan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU serta fasilitas apa saja yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas. Dalam

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2015, partisipasi penyandang disabilitas masih rendah. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap KPU Boyolali adalah 772.142 orang yang terdiri dari 382.642 laki-laki dan 389.501 perempuan. Dari jumlah pemilih tersebut yang menggunakan hak pilih adalah 607.101 pemilih. Jumlah pemilih penyandang disabilitas yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap adalah 145 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilih hanya 117 orang (KPU Boyolali, 2015). Dari data tersebut tampak bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum masuk dalam daftar pemilih.

KPU Boyolali perlu menerapkan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Strategi yang diterapkan KPU Boyolali tersebut tentunya tidak hanya asal dibuat, melainkan melalui berbagai pertimbangan dan riset yang mendalam mengenai kondisi penyandang disabilitas sebagai sasaran serta kondisi internal dari KPU. Dengan merancang strategi ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat menjadi lebih paham mengenai pentingnya mempergunakan hak pilih dalam Pemilu, sehingga semakin banyak penyandang disabilitas yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pilkada, pileg dan pilpres yang akan dilaksanakan. Tulisan ini akan memaparkan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Boyolali.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana peneliti mengambil informan yang mengetahui permasalahan tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang berkenaan menjadi informan dalam penelitian, yaitu Komisiener Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali, Staf KPU Kabupaten Boyolali serta Penyandang Disabilitas 4 orang.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dari Miles dan Huberman yaitu *interactive model*.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis lingkungan internal dan eksternal menghasilkan manfaat yang besar bagi suatu KPU Boyolali. Analisis lingkungan eksternal dan internal memberikan informasi mengenai kelangsungan dan keberhasilan suatu organisasi. Organisasi harus memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya terkait dengan peluang dan ancaman yang mereka hadapi.

Setelah dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, KPU Boyolali mempunyai faktor internal dan faktor eksternal yang akan mempengaruhi pengambilan strategi untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Faktor kekuatan, kelemahan, tantangan, dan hambatan tersebut tersebut dapat disusun dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal KPU Boyolali

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Perangkat Kelembagaan sampai Tingkat Desa 2. Kerjasama yang Baik Antara Anggota Komisioner KPU Boyolali, PPK, PPS, dan KPPS 3. Semua Komisioner dan Staf KPU Boyolali mampu Mengoperasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Dukungan Undang-undang yang Mendukung Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 5. Kerja sama lintas departemen atau instansi yang berjalan bagus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Besar SDM di KPU Boyolali belum menguasai dan memahami mengenai tata cara sosialisasi kepada penyandang disabilitas 2. Anggaran yang terbatas 3. Sosialisasi yang tidak mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas 4. Jadwal yang sudah ditetapkan tidak bias diubah-ubah. 5. Persebaran penyandang disabilitas yang luas di seluruh wilayah Boyolali.
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin banyaknya organisasi yang menaungi para penyandang disabilitas 2. Media cetak, elektronik, dan media sosial mampu menyebarkan informasi secara masif 3. Semakin banyak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang lebih rendah 2. Masyarakat belum peka terhadap hak politik penyandang disabilitas 3. Banyaknya berita yang menyesatkan di media sosial 4. Kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang masih rendah

<p>organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam sosialisasi pemilihan umum</p> <p>4. Banyak even-even yang dilaksanakan khusus bagi para penyandang disabilitas.</p> <p>5. Semakin diterimanya para penyandang disabilitas di masyarakat</p>	<p>5. Inisiatif penyandang disabilitas yang masih rendah.</p>
---	---

Sumber: Data Diolah

Dari tabel di atas dibuat model analisis SWOT strategi KPU Boyolali dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Tabel 2 Analisis SWOT Strategi KPU Boyolali dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum

Faktor Internal	<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Perangkat Kelembagaan sampai Tingkat Desa 2. Kerjasama yang Baik Antara Anggota Komisioner KPU Boyolali, PPK, PPS, dan KPPS 3. Semua Komisioner dan Staf KPU Boyolali mampu Mengoperasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Dukungan Undang-undang yang Mendukung Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 5. Kerjasama lintas departemen atau instansi yang berjalan bagus 	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian Besar SDM di KPU Boyolali belum menguasai dan memahami mengenai tata cara sosialisasi kepada penyandang disabilitas 2. Anggaran yang terbatas 3. Sosialisasi yang tidak mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas 4. Jadwal yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah-ubah. 5. Persebaran penyandang disabilitas yang luas di seluruh wilayah
Faktor Eksternal		

		Boyolali.
<p>Peluang (<i>Opportunities</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin banyaknya organisasi yang menaungi para penyandang disabilitas 2. Media cetak, elektronik, dan media sosial mampu menyebarkan informasi secara masif 3. Semakin banyak organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam sosialisasi pemilihan umum 4. Banyak even-even yang dilaksanakan khusus bagi para penyandang disabilitas. 5. Semakin diterimanya para penyandang disabilitas di masyarakat 	<p>STRATEGI S-O</p> <p>Memperkuat kelembagaan KPU Boyolali melalui peningkatan kemampuan PPS, PPK, dan KPPS dan memanfaatkan media masa dan media sosial dalam mensosialisaikan tahapan-tahapan pemilihan umum</p>	<p>STRATEGI W-O</p> <p>Melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu dengan bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas</p>
<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang lebih rendah 2. Masyarakat belum peka terhadap hak politik penyandang disabilitas 3. Banyaknya berita yang menyesatkan di media sosial 4. Kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang masih rendah 5. Inisiatif penyandang disabilitas yang masih rendah. 	<p>STRATEGI S-T</p> <p>Membentuk relawan demokrasi yang bertugas untuk meningkatkan motivasi kepada masyarakat untuk membantu seluruh lapisan masyarakat khususnya warga penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pemilu</p>	<p>STRATEGI W-T</p> <p>Melakukan sosialisasi <i>face to face</i> atau tatap muka dan perlombaan pemilihan putra-putri demokrasi disabilitas</p>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel analisa strategi dengan SWOT diperoleh strategi yang dilakukan KPU Boyolali untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Hasil analisis strategi menggunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

Strategi S-Obersumber dari kekuatan (*Strenghts*) dan kesempatan (*Opportunities*) yang dimiliki suatu organisasi. Strategi S-O ditetapkan menggunakan kekuatan yang dimiliki suatu organisasi untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki. Strategi S-O yang sesuatu untuk kondisi ini adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif/*growth oriented strategy*. Strategi S-O yang diambil adalah ***memperkuat kelembagaan KPU Boyolali melalui peningkatan kemampuan PPS, PPK, dan KPPS dan memanfaatkan media masa dan media sosial dalam mensosialisaikan tahapan-tahapan pemilihan umum.***

Strategi S-Tadalah bersumber dari kekuatan (*Strenghts*) dandanancaman (*Threats*) ini merupakan strategi yang dibuat berdasarkan kekuatan organisasi yang berasal dar lingkungan internal guna menghadapi ancaman atau hambatan yang

berasal dari lingkungan di luar organisasi. Dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Boyolali, strategi S-T yang diambil KPU Boyolali adalah *membentuk relawan demokrasi yang bertugas untuk meningkatkan motivasi kepada masyarakat untuk membantu seluruh lapisan masyarakat khususnya warga penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pemilu.*

Strategi W-O adalah strategi yang bersumber dari kelemahan (*Weakness*) dan peluang (*Opportunities*) merupakan sebuah strategi yang dibuat dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki organisasi untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi W-O merupakan strategi yang mendukung pelaksanaan strategi *turnaround* (putar balik), yang berarti bahwa organisasi harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Strategi W-O yang dibuat oleh KPU Boyolali dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum adalah *melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu dengan bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas.*

Strategi W-T merupakan strategi yang berasal dari kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*) yang dimiliki organisasi ini merupakan suatu strategi yang dibuat dengan cara meminimalkan kelemahan organisasi dan menghindari ancaman yang berasal dari luar organisasi. Kelemahan yang berasal dari dalam organisasi harus diminimalkan selain itu organisasi juga harus menghindari ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Ini adalah suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi organisasi karena organisasi sedang mengalami ancaman dari luar dan kelemahan dari dalam. Strategi yang mendukung strategi W-T adalah strategi defensif yaitu strategi yang dilakukan melalui tindakan-tindakan inovatif. Strategi yang diambil adalah *melakukan sosialisasi face to face atau tatap muka dan perlombaan pemilihan putra-putri demokrasi disabilitas.*

Strategi KPU Boyolali dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau Pemilihan merupakan bentuk kegiatan politik massif yang diikuti seluruh warga negara yang telah memiliki hak pilih. Namun pada

kenyataannya masih ada sebagian warga negara yang tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Salah satunya adalah sebagian dari kelompok penyandang disabilitas, mereka mendapat stigma dan diskriminasi dari lingkungannya. Hak-hak penyandang disabilitas kurang diperhatikan, sehingga bisa menghilangkan hak pilihnya. Bisa dimengerti jika tingkat partisipasi pemilih kelompok disabilitas selama ini sangat rendah, hal ini berhubungan dengan masalah aksesibilitas pemilu.

Komisi Pemilihan Umum selalu melakukan upaya konstruktif dalam mengupayakan perlakuan yang setara terhadap hak pilih setiap warga negara tanpa kecuali. Komisi Pemilihan Umum memiliki misi meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui penyusunan Peraturan yang aksesabel terhadap penyandang disabilitas, ruang-ruang yang menjadi celah minimnya akses selalu diupayakan untuk diperbaiki. Minimnya informasi dan fasilitas bagi penyandang disabilitas menjadi kendala utama rendahnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Kebijakan yang bisa dilakukan adalah bahwa fasilitas kertas atau surat suara itu perlu ditingkatkan. Hal ini tentu saja bisa dilakukan dengan mengacu pada jumlah data pemilih. Karena tidak semua wilayah ini kan mempunyai pemilih difabel. Dengan data yang akurat, maka diharapkan dari panitia bisa lebih memberikan perhatian khusus bagi kaum difabel. Untuk TPS kedepan, juga disediakan bilik khusus difabel kalau memang di TPS yang bersangkutan terdapat pemilih difabel sehingga kenyamanan kelompok difabel bisa ditingkatkan. Untuk hal ini, memang dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak terutama dari KPU Kabupaten Boyolali dan Dinas Sosial Kabupaten, mengingat karena sekarang dari Dinas Sosial adalah kelompok yang memberi perhatian lebih kepada kaum difabel.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum. Untuk itu KPU Kabupaten Boyolali berupaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat khususnya kelompok penyandang disabilitas melalui kegiatan sosialisasi. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 pasal 1 angka 10, Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan. Dalam implementasinya sosialisasi

diselenggarakan di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam hal ini tentunya Wilayah Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan analisis isu analisis SWOT dan analisis isu strategi yang diuraikan di atas, KPU Boyolali merumuskan strategi atau kebijakan yang dilakukan KPU Boyolali dalam meningkatkan peran warga penyandang disabilitas antara lain:

1. Penguatan Kelembagaan

Menurut Yeremias T. Keban (2000:75) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa Pengembangan Kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

a. Meningkatkan Peran PPK, PPS, dan KPPS sebagai komunikator dalam sosialisasi kegiatan pemilu

Meningkatkan kapasitas dan kualitas (*Capacity Building*) penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS merupakan salah satu strategi penguatan kelembagaan KPU yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih untuk bersedia hadir dalam memberikan suaranya di TPS pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Boyolali. Peranan KPU dan penyelenggara di tingkat bawah ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dilakukan untuk memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara akan sesuai yang diinginkan.

b. Pembentukan Relawan Demokrasi

Salah satu skema program yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali adalah melakukan rekrutmen bagi Relawan Demokrasi. Dalam kapasitasnya untuk membantu kerja-kerja sosialisasi dalam rangka promosi penggunaan hak pilih bagi warga. Kondisi tersebut setidaknya memberi dampak secara tidak langsung bagi upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam Pemilu, mengingat wilayah di Boyolali yang luas dan terdiri dari 19 Kecamatan. Dampak utama yang bisa dirasakan bagi aktivitas para Relawan Demokrasi adalah adanya

peningkatan tingkat partisipasi sebagai bagian dari bentuk kesadaran politik warga untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Keberadaan Relawan Demokrasi untuk mengkampanyekan kesadaran dalam menggunakan hak pilih dirasa mampu memberi kontribusi. Walaupun kendala secara mendasar tetap ada yaitu kendala waktu. Dimana masalah waktu pembentukan para relawan yang dilakukan masih terasa kurang terutama bagi kelompok difabel. Karena untuk sosialisasi kepada difabel banyak yang harus diperhatikan. Berbeda dengan segmentasi relawan demokrasi bagi stakeholder yang lain, mungkin lebih mudah. Karena mereka bisa menggunakan berbagai macam strategi pendekatan namun kalau untuk kelompok difabel, itu tidak bisa dilakukan, karena memang forumnya harus khusus.

Keberadaan Relawan Demokrasi, sejauh ini memberi dampak bagi penyandang disabilitas untuk bisa lebih melek politik. Banyak diskusi-diskusi yang menghasilkan dinamika untuk bisa lebih jauh mengetahui bahwa kebutuhan difabel antar satu kelompok dengan kelompok yang lain tidaklah sama tetapi seringkali dipukul rata bahwa semua difabel itu sama.

2. Strategi Sosialisasi

a. Komunikasi Tatap Muka (*Face to Face*)

Kegiatan sosialisasi tatap muka (*face to face*) pada masyarakat merupakan salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Boyolali dalam menyampaikan informasi seputar pelaksanaan pemilihan umum. Sosialisasi tatap muka (*face to face*) merupakan bagian dari komunikasi antarpribadi yang umumnya berlangsung secara langsung tanpa melalui perantara. Ada beberapa kelompok sasaran masyarakat dalam melakukan sosialisasi tatap muka ini.

Intensitas program-program yang selama ini yang sudah dilakukan yaitu sosialisasi dan pendampingan kedepan mesti harus terus dilakukan. Secara khusus, sebagai contoh adalah program sosialisasi terhadap kelompok-kelompok difabel, yang secara spesifik berbeda dengan orang pada umumnya. Idealnya, kalau tahapan yang dilakukan

tersebut bisa dilakukan secara berkala. Dengan strategi mengembangkan pembuatan kelas belajar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali, maka penyandang disabilitas di kabupaten Boyolali bisa belajar bersama dan menerima penjelasan. Pada saat bersamaan, KPU Kabupaten Boyolali juga bisa mendengar lebih lanjut apa yang diinginkan serta menjadi kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi kedepan, pelaksanaan Pemilu bisa lebih baik lagi.

Berdasarkan penyajian data dimuka serta didukung oleh hasil observasi peneliti tentang strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam melakukan sosialisasi kepada segmen masyarakat disabilitas ini menunjukkan bahwa dari materi sosialisasi yang disampaikan sudah disesuaikan dengan segmen masyarakat disabilitas. Hal tersebut dilihat dari muatan materi sosialisasi yang disampaikan oleh KPU yaitu berupa informasi tentang tahapan, jadwal, dan program pemilihan kemudian memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat disabilitas tentang pentingnya partisipasi masyarakat disabilitas dalam mendukung terlaksananya pemilu Kabupaten Boyolali, selain itu KPU juga memberikan motifasi serta dukungan kepada masyarakat penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga Negara dengan memberikan perlakuan khusus kepada mereka pada saat pelaksanaan pemilu, dengan begitu akan mampu menekan angka golput dari masyarakat penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilu Kabupaten Boyolali.

Sasaran sosialisasi kepada segmen ini yaitu kepada seluruh masyarakat penyandang disabilitas yang tersebar di beberapa Desa dan Kelurahan di lingkungan Kabupaten Boyolali. Sosialisasi kepada segmen ini sangat penting untuk dilakukan karena secara kuantitas masyarakat penyandang disabilitas mempunyai jumlah yang sangat banyak, serta karena masyarakat disabilitas mempunyai keterbatasan fisik sehingga perlu adanya dukungan, motifasi yang lebih untuk mendorong mereka dalam mengikuti pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung.

Metode sosialisasi yang yaitu berupa tatap muka dengan pola pelaksanaannya yaitu melalui ceramah, dialog, serta melakukan simulasi

pencoblosan, metode ini dipilih oleh KPU dengan maksud selain menyebarkan informasi pemilu kepada masyarakat, KPU juga ingin menjalin ikatan emosional dengan masyarakat penyandang disabilitas.

Dari strategi sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali kepada segmen masyarakat disabilitas tersebut dilihat dari muatan materi sosialisasi, sasaran sosialisasi, serta metode sosialisasi yang digunakan menunjukkan sudah sesuai dengan karakteristik segmenya, serta pelaksanaan sosialisasi tersebut sudah sejalan dengan peraturan yang ada.

b. Komunikasi Melalui Media

Adanya penggunaan berbagai media komunikasi yang digunakan KPU Kabupaten Boyolali dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Umum, merupakan hal yang penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Penggunaan media seperti surat kabar, radio, televisi dan media sosial sangat diperlukan untuk menjelaskan serta memberikan informasi kepada masyarakat yang tersebar tanpa harus ketemu secara langsung dimanapun mereka berada. Media massa dan media sosial dapat pula memberikan keserempakan pemahaman mengenai pesan yang disampaikan kepada khalayak. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak. Sifat media massa adalah serempak cepat, yang dimaksud dengan keserempakan disini ialah keserempakan kontak antara komunikator dengan komunikan yang demikian besar jumlahnya. Media sosial yang dimanfaatkan dalam menyampaikan tahapan-tahapan pemilihan umum antara lain Facebook, Instagram, dan Twitter.

Dengan tersedia beragam akses informasi dari berbagai sumber bisa berasal dari internet, koran dan media cetak, dan juga televisi, kelompok difabel antusias dengan pelaksanaan Pemilu karena mereka juga berharap mempunyai pemimpin yang mampu memahami kebutuhan difabel. Mereka ingin hak-haknya sebagai warga negara juga diperhatikan. Oleh karena itu, mereka senantiasa mengikuti perkembangan politik yang ada. Secara khusus, kelompok kaum difabel yang memiliki melek politik paling tinggi adalah kelompok tuna daksa. Karena tuna daksa memiliki

kemampuan akses informasi yang lebih baik, karena mereka mempunyai panca indera yang semuanya normal. Lewat kemampuan untuk membaca koran, mendengarkan televisi, dan maupun membaca artikel-artikel di internet, berharap memiliki pemimpin yang benar-benar bisa memahami.

Kemudian membangun kesadaran dan partisipasi yang lebih luas, dengan menempatkan keberadaan media massa yang bisa diakses oleh publik secara luas, sebagai materi dasar bagi pendidikan pemilih dan upaya membangun dinamika politik warga. Media massa lokal dengan materi lokal tentu member kontribusi besar bagi dinamika politik ditingkat lokal. Dimana aktivitas dan semua bagian dari masyarakat Boyolali menjadi fokus yang materi yang didistribusikan. Informasi tersebut menjadi bekal bagi upaya mendinamisir kehidupan demokrasi, sebab informasi harus dishare publik untuk kemudian menjadi dasar bagi keputusan politik untuk kepentingan publik.

c. Lomba Pemilihan Putra Putri Demokrasi Disabilitas

Tujuan kegiatan sosialisasi adalah menyebarluaskan informasi mengenai program dan kegiatan kepemiluan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban serta meningkatkan partipasi masyarakat Boyolali khususnya kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan sosialisasi adalah kelompok disabilitas / pemilih dengan kebutuhan khusus di Kabupaten Boyolali yang sudah memiliki hak pilih.

Kegiatan Pemilihan Putra Putri Demokrasi Disabilitas Kabupaten Boyolali Tahun 2017 dilaksanakan tanggal 10 Mei 2017 bertempat di Pendopo Alit Rumah Dinas Bupati Boyolali, Jalan Merbabu. Kegiatan diawali Pembacaan Laporan Kegiatan oleh Drs. Catur Idi Wiseno (Sekretaris KPU Kabupaten Boyolali), kemudian dilanjutkan pembukaan oleh Siswadi Sapto Harjono, SP (Ketua KPU Kabupaten Boyolali) sekaligus membuka acara.

Sebelum dilaksanakan kegiatan Pemilihan Putra Putri Demokrasi Disabilitas Kabupaten Boyolali Tahun 2017, diawali terlebih dahulu dengan

pemberian Materi Pendidikan Pemilih yang bertemakan Aksesibilitas Pemilu oleh Pargito, SS (Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat).

Kegiatan Pemilihan Putra Putri Demokrasi Disabilitas Kabupaten Boyolali Tahun 2017 diikuti oleh 17 (tujuh belas) pasangan yang terdiri dari 14 pasangan perwakilan FKDB (Forum Komunikasi Disabilitas Boyolali) Kecamatan di Boyolali dan 3 pasangan dari Komtuboy (Komunitas Tuna Rungu Boyolali).

Kegiatan sosialisasi dengan sasaran kelompok disabilitas ini menjadi menarik dan berbeda karena formatnya yang mengadopsi kontes atau pemilihan pada umumnya. Namun tidak mengabaikan dari tujuan awal dari misi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif. Dari kemasan kegiatan yang dibuat sedemikian rupa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali juga ingin membangun kesadaran politik kelompok disabilitas yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, selain itu kelompok disabilitas juga bisa dan mampu untuk berperan aktif dalam Penyelenggaraan Pemilu.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman KPU Boyolali, maka dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yang diterapkan oleh KPU Boyolali antara lain: 1) Penguatan Kelembagaan, dilaksanakan dengan strategi: a) meningkatkan Peran PPK, PPS, dan KPPS sebagai komunikator dalam sosialisasi kegiatan pemilu; b) Pembentukan Relawan Demokrasi; dan 2) Strategi Sosialisasi, yang dilaksanakan dengan strategi: a) Komunikasi Tatap Muka (*Face to Face*); b) Komunikasi Melalui Media; dan c) Pemilihan Putra Putri Demokrasi Disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

www.nasional.kompas.com

Yeremias T. Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media